

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Ide awal topik penelitian ini berangkat dari besarnya minat penulis mengkaji fenomena pengaruh aktor-aktor non-government dalam usaha menjaga keseimbangan lingkungan dalam hubungan internasional kontemporer. Intensitas isu lingkungan global tidak saja melibatkan peran banyak negara sebagai aktor utama, tetapi juga melibatkan berbagai institusi internasional dan NGO termasuk pula perusahaan-perusahaan multinasional. Perkembangan isu lingkungan dewasa ini menunjukkan semakin pentingnya peran non-state karena peran Negara sebagai aktor dominan dalam mengupayakan berbagai penyelesaian internasional untuk mengatasi masalah lingkungan global mulai terkikis. NGOs merupakan salah satu aktor non-state yang berperan dalam pembentukan opini publik secara luas, membangun jaringan kerja yang efektif serta memberikan tekanan yang kuat kepada pemerintah dalam proses tawar menawar sebuah perundingan.

Pembangunan pun menjadi salah satu indikator yang menyebabkann terjadinya ketidakseimbangan lingkungan bahkan pada tahap terjadinya kerusakan lingkungan. Namun perlu kita cermati pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan yang *shallow ecology/ekologi dangkal*. *Shallow ecology* adalah gagasan yang berpusat pada kebutuhan manusia, bersifat jangka pendek dan

menempatkan lingkungan sebagai instrumen akumulasi modal atau melihat lingkungan sebagai faktor produksi.¹

Pembangunan industri kelapa sawit dianggap merupakan salah satu contoh pembangunan yang *shallow ecology*. Hal ini dapat dilihat dari semakin bertambahnya masalah-masalah yang dikaitkan dengan industri kelapa sawit di berbagai daerah di Indonesia. Walaupun demikian perlu dipahami bahwa industri kelapa sawit memiliki prospek yang cerah. Industri ini merupakan salah satu komoditas andalan dalam menghasilkan devisa negara sektor non-migas. Selain itu jumlah permintaan terhadap produk kelapa sawit ini lebih tinggi dibandingkan minyak nabati lainnya yang ada di dunia.² Ekspansi lahan pun dilakukan pemerintah Indonesia untuk perkembangan perkebunan kelapa sawit. Hal ini dicanangkan melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (*MP3EI*).

Rezim baru dalam pengolahan industri kelapa sawit dianggap sebagai jalan keluar dari setiap permasalahan. Rezim ini memudahkan negara dan aktor internasional lainnya untuk bekerjasama sebagai reaksi terhadap kebutuhan untuk melakukan koordinasi perilaku tentang isu pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

RSPO (*Roundtable On Sustainable Palm Oil*) hadir sebagai sebuah rezim internasional yang menuntut pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. RSPO

¹Etika Lingkungan 10.2, diakses melalui http://www.crayonpedia.org/mw/Etika_Lingkungan_10.2, pada 16 April 2012, pukul 11:26.

² Arga Paradita Sutiono, *outlook industri perkebunan 2010*, dalam Research Asia Securities 30 November 2009, Hal. 1.

adalah sebuah asosiasi yang menyatukan multistakeholder melalui standar yang kredibel dengan keterlibatan para pemangku kepentingan tersebut. RSPO ini diprakarsai oleh WWF International Network sampai pada WWF Indonesia inisiatif.³ Kerjasama berbagai pihak sangat dibutuhkan melihat pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya masyarakat.

Alasan tersebut di atas mendorong penulis tertarik untuk mengangkat **Kerjasama Perusahaan Kelapa Sawit dan WWF Indonesia dalam Penerapan Skema RSPO (Roundtable On Sustainable Palm Oil) untuk Mendukung Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan** menjadi judul skripsi ini.

B. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah agar penulis dapat mengetahui kerjasama yang terjalin antara perusahaan kelapa sawit dan WWF indonesia dalam penerapan skema RSPO. Tujuan lain adalah :

1. Memberikan pengetahuan tentang praktek terbaik pada industri kelapa sawit yang berorientasi pada kaidah pembangunan berkelanjutan
2. Menjelaskan permasalahan lingkungan yang harus menjadi tanggung jawab bersama.
3. Sebagai langkah awal memberikan informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

³ *Ibid.*

C. Latar Belakang Masalah

Permasalahan lingkungan dewasa ini sering dikaitkan sebagai dampak dari suatu industri. Bencana alam yang melanda dunia yang hadir disebut sebagai kesalahan manusia. Tanggapan ini bukan berarti tidak beralasan. Kemampuan alam untuk menjaga keseimbangannya sendiri terjadi melalui suatu proses alamiah. Terbentuknya suatu ekosistem yang di dalamnya terdapat serangkaian suatu proses yang disebut para ahli biologi “rantai makanan dan piramida makanan” terjadi secara alamiah yang artinya tanpa buatan manusia. Namun, masa depan ekosistem atau suatu lingkungan tersebut ada di tangan manusia. Banyaknya pengolahan alam dan lingkungan yang tidak bertanggung jawablah yang berujung pada suatu bencana.

Dewasa ini muncul suatu standar pengolahan kelapa sawit dunia. Standar ini hadir di tengah – tengah tidak adanya aturan baku pengolahan industri kelapa sawit yang ramah lingkungan dan berkeadilan di dunia. RSPO (*Roundtable On Sustainable Palm Oil*) merupakan suatu standar pengolahan kelapa sawit ramah lingkungan dan berkelanjutan yang menjadi rezim baru dalam pengolahan kelapa sawit di dunia. Asosiasi ini dibentuk pada tahun 2004 yang menyatukan pemangku kepentingan dari tujuh sektor industri kelapa sawit. Ketujuh sektor ini adalah produsen minyak sawit, pengolah minyak sawit atau pedagang, produsen barang konsumen, pengecer, bank dan investor, LSM lingkungan atau konservasi alam dan sosial. RSPO ini diprakarsai oleh Organisasi Internasional non-pemerintah (INGO). WWF (*World Wildlife Fund for Nature*) merupakan organisasi lingkungan hidup yang memiliki basis di berbagai negara di dunia.

RSPO hadir sebagai semangat akan sinergisitas aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan. Pembangunan ekonomi yang menekankan pada perolehan pendapatan yang berbasis pada penggunaan sumberdaya yang efisien. Perlindungan lingkungan menekankan pada pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati yang akan memberikan kontribusi pada keseimbangan ekosistem dunia. Sedangkan, pembangunan sosial menekankan pada pemeliharaan kestabilan sistem sosial budaya meliputi penghindaran konflik keadilan baik dalam satu generasi maupun antar generasi. Lahirnya RSPO ini berawal dari keprihatinan seorang aktifis lingkungan *Bruno Mancera* yang melihat dampak dari pengolahan kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia yang tidak ramah lingkungan dan menimbulkan masalah sosial dan pelanggaran HAM.⁴

Pelanggaran tersebut dapat dilihat secara nyata pada pembukaan lahan untuk perkebunan hingga proses produksi kelapa sawit nasional. Dalam proses tersebut pihak industri kelapa sawit banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, seperti, pembakaran hutan, pengalifungsian hutan primer menjadi perkebunan, pembantaian hewan – hewan yang dianggap sebagai hama, hilangnya hutan dengan nilai konservasi tinggi, serta tata kelolah perkebunan yang tidak berpihak kepada masyarakat setempat dengan banyaknya pelanggaran HAM yang muncul. Permasalahan yang ada semakin meresahkan masyarakat setempat hingga masyarakat internasional yang secara tidak langsung turut terkena imbas dari pengolahan industri kelapa sawit yang *Unsustainable*.

⁴ *Ibid.*

Hal ini mendapat dukungan dari dunia internasional seperti munculnya artikel – artikel di berbagai media cetak dan elektronik yang berisi kritikan dan protes terhadap dampak negatif dari pembangunan perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran. Hingga reaksi pemblokiran produk kelapa sawit Indonesia yang dinilai Unsustainable. Namun tidak dapat dipungkiri kelapa sawit merupakan kebutuhan pokok manusia di bumi. Selain manfaatnya sebagai konsumsi pangan sehari-hari, kelapa sawit juga digunakan sebagai sumber energi alternatif (biodiesel) pengganti bahan bakar migas yang semakin menipis. Hal ini berimbas pada semakin meningkatnya permintaan minyak kelapa sawit dunia dibandingkan minyak nabati lainya yang diproduksi dunia. Berikut tabel permintaan minyak nabati dunia.

Tabel 1: World Vegetable Oil Consumption

World Vegetable Oil Consumption								Mio/Ton
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 F
CPO	30,23	33,68	36,26	38,03	42,67	46,20	46,45	48,79
Soybean	31,05	32,83	34,55	37,07	38,07	36,36	39,21	42,10
Rapeseed	15,02	16,15	18,15	19,07	19,76	21,56	23,53	23,66
Sunflower	9,59	9,54	10,88	11,18	10,37	11,82	12,70	12,55
PKO	3,64	3,95	4,21	4,58	4,84	5,42	5,23	5,47
Others	18,95	19,55	19,42	19,88	19,96	19,22	20,20	20,20
Total Veg Oils	108,47	115,69	123,47	129,81	135,66	140,58	147,32	152,77

Sumber : Oil World 23 September 2011

Tingginya permintaan maka akan meningkatkan pula jumlah produksi minyak kelapa sawit dunia. Keunggulan minyak kelapa sawit ini membawa keuntungan tersendiri bagi negara-negara produsen minyak kelapa sawit.

Indonesia merupakan negara produsen minyak kelapa sawit. Total produksi Indonesia tertinggi dibanding beberapa negara produsen minyak kelapa sawit lainnya. Berikut tabel negara produsen kelapa sawit.

Tabel 2: Palm Oil Production

Palm Oil Production								Mio/Ton
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 F
Indonesia	12,38	14,10	16,05	17,27	19,20	21,14	25,34	27,37
Malaysia	13,97	14,96	15,88	15,82	17,73	18,10	19,14	20,88
Others	8,44	8,92	9,73	10,25	11,22	11,31	6,63	7,06
Total	34,79	37,98	41,67	43,35	48,15	50,55	51,10	55,30

Sumber : Oil World 23 September 2011

Pertumbuhan industri kelapa sawit Indonesia pun semakin pesat setiap tahunnya. Cerahnya prospek komoditi minyak sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong pemerintah Indonesia untuk membuka selebar-lebarnya izin usaha dan penanaman modal kepada para investor baik dari dalam maupun luar negeri. Peran para pelaku bisnis kelapa sawit pada perekonomian nasional Indonesia suatu yang vital karena kelapa sawit memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia selama bertahun – tahun.

Namun pertumbuhan industri kelapa sawit Indonesia seiring dengan semakin bertambahnya permasalahan sosial dan lingkungan yang muncul. Ketidakberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia tersebut dilihat dari kampanye negatif dari produksi kelapa sawit Indonesia. Seperti kasus yang dialami oleh PT. SMART (*Sinar Mas Agro Resources and Technology*). Kasus yang terjadi hingga pada memutuskan kontrak kerja sama yang telah dijalani oleh MNC raksasa dunia (*Unilever, Nestle*) dan PT. SMART. Serta artikel di sebuah media elektronik Jerman “Down to Earth edisi 88 tahun2011” yang menuliskan masalah-masalah yang muncul dari seratus tahun industri kelapa sawit Indonesia

Kondisi seperti ini menjadikan perusahaan dan segenap pelaku industri perkalapasawitan berusaha mengadopsi Prinsip dan Kriteria RSPO. Hal ini dilakukan melalui interpretasi nasional prinsip dan kriteria RSPO untuk produksi minyak sawit berkelanjutan sebagai standar dalam sertifikasi produksi kelapa sawit Indonesia. Tentu saja didasari oleh kesadaran segala pihak pada pentingnya penerapan praktek terbaik pada industri kelapa sawit Indonesia untuk menjadikan kelapa sawit Indonesia yang ramah lingkungan dan berkeadilan. Label *Green Palm* menjadi indikator pada setiap produk kelapa sawit yang telah memenuhi Prinsip dan Kriteria RSPO. Sejak keluarnya suatu kebijakan mengenai sertifikat green palm tersebut, perusahaan kelapa sawit Indonesia dan dunia mulai menerapkan prinsip-prinsip dan kriteria kelapa sawit berkelanjutan.

Pentingnya sertifikasi *Green Palm* tersebut, interpretasi nasional penerapan skema RSPO memerlukan kerjasama dari setiap sektor industri kelapa sawit. Pihak-pihak non-pemerintah secara aktif berupaya menerapkan rezim baru perkelapasawitan dunia ini pada industri kelapa sawit nasional. Untuk itu kerjasama di sepanjang rantai pasok kelapa sawit sangat penting.

WWF Indonesia merupakan salah satu NGO lingkungan yang mendukung interpretasi nasional Prinsip dan Kriteria RSPO pada industri kelapa sawit Indonesia. WWF Indonesia merupakan jaringan dari WWF Internasional yang menyuarakan perlunya pembangunan industri kelapa sawit yang lebih ramah lingkungan dan berkeadilan. Meskipun, secara hukum WWF Indonesia merupakan lembaga independen berbadan hukum Indonesia. WWF merupakan

organisasi pelestarian lingkungan yang bekerja diserasus negara termasuk Indonesia.

WWF awalnya hanya bekerja secara informal dengan salah satu industri minyak kelapa sawit di Swiss (*Ghana Oil Palm Development Company*/GOPDC). Ide ini kemudian disampaikan kepada beberapa aktor Internasional seperti Migros, Golden Hope, Unilever, Malaysia Palm Oil Association, Sainsbury's dan Aarhus Inggris. Ide WWF ini mendapat penghargaan dari KTT Dunia PBB mengenai Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg.⁵

Sebagai standar perkelapasawitan dunia yang baru tentu saja pengadopsian Prinsip dan Kriteria RSPO oleh sektor – sektor industri kelapa sawit mengalami berbagai kesulitan. Oleh sebab itu, dukungan berbagai pihak selalu menjadi penting dalam proses ini, baik yang berasal dari pemerintah, organisasi non pemerintah, masyarakat, serta pihak industrial. Terutama kerjasama antara ketujuh sektor industri kelapa sawit tersebut.

Pemaparan di atas menarik minat saya untuk mengetahui lebih banyak bagaimana kerjasama yang terjalin antara perusahaan kelapa sawit dengan WWF Indonesia dalam menerapkan skema RSPO untuk mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

⁵ Sejarah berdirinya RSPO, diakses pada tanggal 26 Juni 2011 dari <http://www.rspo.org/?q=page/10..>

D. Pokok Permasalahan

Dari pembahasan yang dikemukakan, maka yang ingin diangkat dalam skripsi ini sebagai pokok permasalahan adalah Bagaimanakah perusahaan kelapa sawit dan WWF Indonesia bekerjasama dalam penerapan skema RSPO untuk mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia?

E. Kerangka Dasar Teori

Dalam menjelaskan suatu fenomena, penulis membutuhkan dasar-dasar atau kerangka berfikir yang akan digunakan untuk membantu penulis dalam menjelaskan fenomena tersebut. Oleh karena itu, kerangka dasar berfikir yang akan digunakan adalah konsep pembangunan berkelanjutan dan teori kemitraan (Partnership) sebagai salah satu bentuk kerjasama.

1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Dalam kajian ilmu sosial, pembangunan memiliki Filosofi sebagai usaha:

- a) *Sustenance*: The ability to meet basic needs, Pembangunan harus mampu meningkatkan kemampuan setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) yakni makanan, naungan, kesehatan, dan perlindungan
- b) *Self-esteem*: To be a person. Pembangunan harus memberikan penghargaan diri sebagai manusia dan tidak digunakan sebagai alat

- c) Freedom from servitude: To be able to choose. Pembangunan harus membebaskan manusia dari perhambaan dan ketergantungan pada alam, kebodohan, dan kemelaratan.⁶

Fenomena HI pada dasarnya adalah fenomena penyebaran, pertarungan, dan perlawanan antara konsep-konsep pembangunan yang dapat mempengaruhi suatu negara. Pembangunan juga membentuk pola-pola kerjasama, aliansi, konflik, dan perang dalam hubungan internasional. Pembangunan melibatkan aktor dan agen dalam hubungan internasional (state, regional forum, internasional forum, CSO, dan lain sebagainya).⁷

Budimanta (2005) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan pada kepada generasi yang akan datang untuk menikmatinya dan memanfaatkannya. Proses pembangunan berkelanjutan memiliki proses perubahan terencana, yang di dalamnya terdapat eksploitasi sumberdaya, arah orientasi investasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang kesemuanya ini dalam kondisi selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi aspirasi masyarakat.

⁶ Arief Budiman, Model Pembangunan: *Teori Pembangunan Dalam Studi Hubungan Internasional*, LP3ES, 1995.

⁷ *Ibid.*

Sejak UNCED (*UN Conference on Environment and Development*), pembangunan keberlanjutan telah menjadi bagian dari kamus internasional. Konsep dan implementasinya telah tergabung dalam banyak deklarasi PBB, sedangkan konteksnya telah diadopsi institusi dan organisasi dunia sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. *WCED (World Commission for Environmental and Development)* mempopulerkan pembangunan berkelanjutan melalui laporan yang berjudul “*Our common future*” pada 1987.

WCED mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai “pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang”. Esensi pembangunan berkelanjutan adalah “perbaikan mutu kehidupan manusia dengan tetap berusaha tidak melampaui kemampuan ekosistem yang mendukung kehidupannya. Sedangkan ekonomi berkelanjutan merupakan buah dari pembangunan berkelanjutan, yaitu “sistem ekonomi yang tetap memelihara basis sumberdaya alam yang digunakan dengan terus mengadakan penyesuaian-penyesuaian dan penyempurnaan-penyempurnaan pengetahuan, organisasi, efisiensi teknis dan kebijaksanaan.

Konsep tersebut memuat dua gagasan penting, pertama gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial kaum miskin sedunia harus diberi prioritas utama. Kedua gagasan keterbatasan, yang bersumber

pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Jadi, tujuan pembangunan ekonomi dan sosial harus tertuang dalam gagasan pembangunan di semua negara.

Komitmen pemerintah Indonesia untuk mengadopsi dan rencana tindak lanjut pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui konferensi tingkat nasional yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2004 di Yogyakarta, dan menjadi dasar semua pihak untuk melaksanakannya.

Kesepakatan nasional tersebut menjadi dasar pembangunan berkelanjutan di segala bidang di Indonesia. Salah satu adopsi model pembangunan berkelanjutan yang diterapkan adalah pada sektor industri kelapa sawit. Hal ini dilihat dari potensi sektor ini yang memberikan peluang bisnis yang menguntungkan bagi Indonesia serta tingkat konflik dan masalah lingkungan yang ditimbulkan dari sektor ini. Adopsi pembangunan berkelanjutan pada sektor kelapa sawit ini diharapkan menjadi salah satu cara dalam usaha pengentasan kemiskinan dan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat serta mengurangi dampak kerusakan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pendekatan, yaitu pendekatan ekonomi, ekologi, dan sosial. Pendekatan ekonomi menekankan pada perolehan pendapatan yang berbasis pada

penggunaan sumberdaya yang efisien. Pendekatan ekologi menekankan pada pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati yang akan memberikan kontribusi pada keseimbangan ekosistem dunia. Pendekatan sosial menekankan pada pemeliharaan kestabilan sistem sosial budaya meliputi penghindaran konflik keadilan baik dalam satu generasi maupun antar generasi.

Pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan adalah pembangunan suatu sistem kelolah perkebunan dan industri kelapa sawit yang mengadopsi pola-pola pembangunan berkelanjutan dan mensinergikan aspek pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Keseriusan tindakan pengawasan produk perkebunan kelapa sawit yang menerapkan pola-pola pembangunan berkelanjutan muncul setelah keluarnya suatu standar perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan (RSPO/Roundtable on Sustainable Palm Oil).

Setiap lapisan masyarakat di dunia menjadi pelaku dan pengawas dalam keberlangsungan pembangunan berkelanjutan tersebut. Salah satu contoh hal ini terbukti ketika produk kelapa sawit dari salah satu negara tidak diterima di pasar internasional karena dianggap tidak ramah lingkungan menurut prinsip pembangunan berkelanjutan.

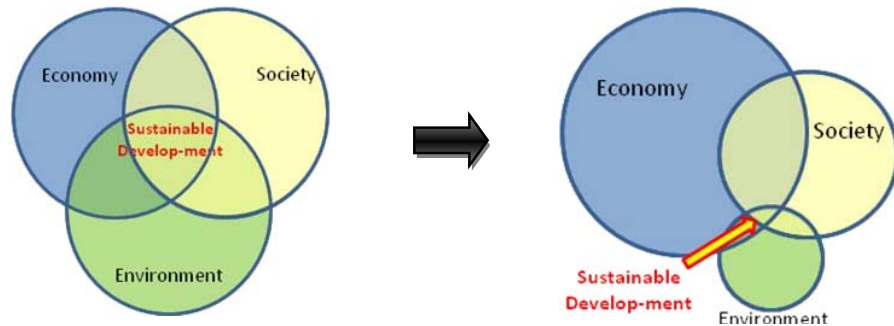
Para pelaku bisnis Industri kelapa sawit di Indonesia mulai beradaptasi dengan pola pembangunan kelapa sawit berkelanjutan

tersebut. Hal ini dapat dilihat melalui keseriusan mereka yang tergabung dalam kelompok kerja untuk menginterpretasikan standar pembangunan kelapa sawit berkelanjutan melalui RSPO. Persepsi yang sama dalam menanggapi panggilan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan juga berasal dari WWF Indonesia selaku NGO lingkungan.

WWF Indonesia merupakan NGO lingkungan yang memiliki basis internasional. Standar pembangunan kelapa sawit berkelanjutan merupakan salah satu WWF Network Inisiatif. Konsep pembangunan berkelanjutan pada WWF Network Inisiatif kemudian menjadi WWF National Inisiatif di berbagai negara di dunia. Meskipun WWF Indonesia telah memiliki lembaga independen berbentuk yayasan di Indonesia, namun pembangunan kelapa sawit berkelanjutan merupakan salah satu WWF National Inisiatif. Melalui kelompok kerja untuk mendukung interpretasi nasional terhadap prinsip dan kriteria RSPO untuk pembangunan berkelanjutan WWF Indonesia bekerjasama dengan para pelaku bisnis kelapa sawit Indonesia merupakan sebuah langkah nyata dari WWF National Inisiatif.

WWF Indonesia sebagai NGO yang bergerak dibidang konservasi lingkungan memberikan wajah baru dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan terjadinya pergeseran konsep berkelanjutan tersebut pada pola-pola pembangunan dewasa ini.

Gambar 1: Pergeseran Paradigma Pembangunan

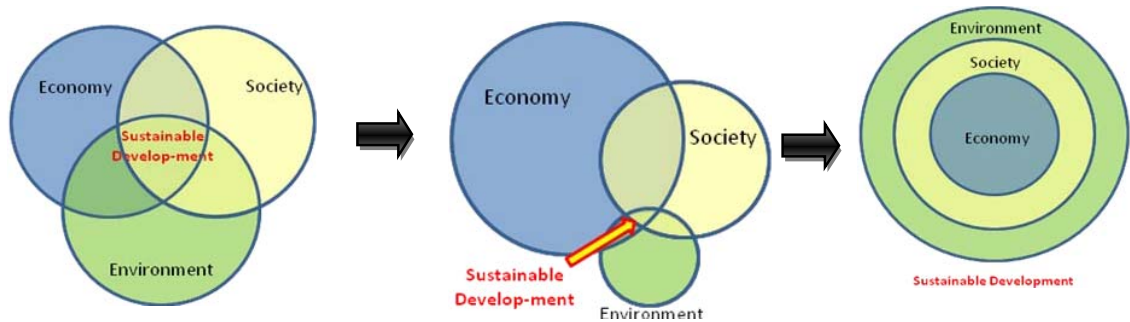


Sumber: WWF Indonesia

Pergeseran konsep pembangunan berkelanjutan dari yang seimbang menjadi timpang karena sektor ekonomi cenderung lebih dikedepankan dibanding dua pilar pembangunan lainnya yaitu sosial dan lingkungan. Serta dapat dilihat lingkunganlah yang paling diabaikan dari pembangunan yang berlangsung.

Melihat pergeseran konsep pembangunan berkelanjutan yang semakin mengorbankan lingkungan khususnya dan sosial maka RSPO memiliki konsep dan mendefinisikan Pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang menghasilkan nilai ekonomi dari suatu proses yang ramah lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Gambar 2: Transformasi Pembangunan



Sumber: WWF Indonesia

Artinya Keberlanjutan lingkungan berarti bahwa sumber daya alam kritis dan fungsi-fungsi ekologis harus dijaga, tingkat konversi harus dipertahankan dalam tingkat yang dapat diterima, dan kehilangan *natural capital* harus dikompensasi.

Begitu juga konsep pembangunan berkelanjutan dalam sektor kelapa sawit. Namun yang lebih penting dari konsep pembangunan kelapa sawit berkelanjutan adalah adanya sumberdaya manusia pelaksana pembangunan kelapa sawit berkelanjutan yang memahami esensi dari pembangunan berkelanjutan. Setiap individu secara tidak langsung memiliki kontribusi dalam pembangunan tersebut. Dengan demikian, pembangunan kelapa sawit berkelanjutan tidak semata-mata merupakan komitmen kelembagaan, namun menjadi komitmen pribadi masing-masing. Kebijakan pembangunan berkelanjutan haruslah didukung oleh supermasi hukum lingkungan dan kondisi *good governance*. Konsep sustainable development ini merupakan konsep yang dinamis, berkembang mengikiti perkembangan pengetahuan.

2. Teori Kemitraan (*partnership*) Sebagai Salah Satu Bentuk Kerjasama.

Kerjasama atau lebih dikenal dengan Kemitraan (*partnership*) dengan istilah lain juga disebut dengan gotong royong pada esensinya merupakan hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, saling memperkuat, dan saling ketergantungan antara dua belah pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Teece, kemitraan adalah: “*suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.*”⁸

Kemitraan yang baik adalah yang mampu memberi keuntungan atau nilai lebih bagi masing-masing pihak yang bermitra dengan kata lain memberikan win-win solution. Nilai lebih ini tidak harus berupa materi, namun bisa pula dalam bentuk peningkatan kapasitas layanan (pendidikan, kesehatan, penyediaan tenaga kerja, dll) bertambahnya akses seperti kerjasama sosial, ekonomi, dan lingkungan yang diperankan oleh aktor non-government.

Pada dasarnya setiap negara akan menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan. Hal ini di karenakan keterbatasan sumber-sumber daya alam di suatu negara serta keterbatasan geografis negara tersebut. Keterbatasan tersebut menyebabkan setiap negara berusaha

⁸ Teece, D.J., *Competition, Cooperation, and Innovation: organization rangements for regimes of rapid technologycal progress.* Jurnal of economic bahavior and organization 18, 1992, 1.

menggunakan sumberdaya yang dikuasai secara optimum untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Linton mengemukakan beberapa penyebab melakukan kemitraan adalah:

“Untuk bisa mencapai tujuan yaitu kesejahteraan bersama (kesejahteraan ekonomi, sosial dan menjaga keamanan bersama) beberapa pihak seringkali tidak bisa melakukannya secara sendiri-sendiri, keterbatasan sumberdaya (fisik-geografis, sosial, ekonomi) yang dimiliki oleh masing-masing kelompok telah ‘memaksa’ untuk saling berbagi sumberdaya yang dimiliki dan melakukan kerjasama. Kemitraan tidak selalu dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama. Setiap pihak yang bermitra bisa saja memiliki tujuan sendiri-sendiri. Esensi terpenting adalah berbagi sumber daya dan saling menguntungkan.”⁹

John R. Commons dalam bukunya yang berjudul *institutional economics* mengemukakan pentingnya kerjasama dengan orang lain, atau kelompok lain untuk mencapai tujuan bersama.¹⁰ Untuk menghindari konflik antara kepentingan individu dan kepentingan bersama “pengendalian bersama” (*colective controls*), yang mempunyai tugas dalam mengawasi proses tawar-menawar dan harga serta transaksi yang dijalankan. Dalam aspek ekonomi, John R. Commons dan Mubyarto (2002), mengakui prinsip ekonomi neoklasik tentang kelangkaan (*scarcity*) dan asas efisiensi untuk mengatasinya tetapi

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid*, hal 66.

berbeda dengan teori ekonomi klasik dalam cara-cara mencapai harmoni atau keseimbangan yaitu dengan tidak menyerahkan pada mekanisme pasar melalui persaingan (*competition*) tetapi melalui kerjasama (*cooperation*) dan tindakan bersama (*collective action*). Sehingga akan tercapai keseimbangan antara pertumbuhan dalam jangka pendek disatu sisi dan aspek pemerataan dan sustainabilitas dalam jangka panjang di sisi lain.

Menurut Eisler, Rione, & Montuori, Alfonso ada beberapa model hubungan kemitraan, yaitu: pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan pihak kedua berada pada level yang sama sebab mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama, dan saling menghargai.¹¹

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa RSPO merupakan organisasi yang mempertemukan multistakeholder dalam satu kemitraan, termasuk di dalamnya pengusaha industri kelapa sawit yang profit oriented dan NGO yang non-profit oriented. Perbedaan visi dan misi yang diusung masing-masing pihak tidak menjadi hambatan bagi masing-masing pihak untuk bergabung dalam suatu kerjasama.

¹¹ *Ibid*, 67.

Perbedaan ini dijadikan suatu momentum untuk saling melengkapi dan memberikan kontribusi dalam mewujudkan pengelolaan industri kelapa sawit Indonesia yang bertanggungjawab dan berkelanjutan, tanpa menghilangkan karakteristik masing-masing pihak.

Hubungan kerjasama ini terwujud dalam kelompok kerja INA-NIWG (*Indonesia-National Interpretation Working Group*) yang bertugas menyusun interpretasi nasional untuk Indonesia terhadap Prinsip dan Kriteria RSPO. Prinsip dan Kriteria Indonesia merupakan panduan penerapan produksi industri kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Penting halnya menyusun suatu dokumentasi interpretasi nasional terhadap Prinsip dan Kriteria RSPO bagi Republik Indonesia dalam mewujudkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Kelompok kerja Indonesia Nasional Interpretation Working Group (INA-NIWG) beranggotakan para pemangku kepentingan di sepanjang rantai pasok kelapa sawit.

Kelompok kerja ini terbentuk sejak WWF memprakarsai penerapan Prinsip dan Kriteria RSPO agar dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemerintah dan perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Awalnya WWF memprakarsai terbentuknya RILO (*regional intelligency liaison office*) pada roundtable ke-4 di Singapura yang bertujuan mendukung RSPO di Kuala Lumpur dan meningkatkan pelaksanaan tujuan RSPO di Indonesia. Kemudian RILO membentuk kelompok kerja atau yang disebut INA-NIWG.

WWF bersama dengan INA-NIWG menyusun draf interpretasi nasional mengimplementasikannya kedalam UU dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Fakta ini menunjukkan kepada kita bahwa WWF dan perusahaan kelapa sawit yang tergabung dalam INA-NIWG mampu bekerjasama dalam menerapkan skema RSPO untuk mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia tanpa menghilangkan karakteristik masing-masing pihak.

F. Hipotesis

Berdasarkan data sementara dan kerangka pemikiran yang digunakan diperoleh jawaban sementara sebagai berikut, Perusahaan kelapa sawit dan WWF Indonesia bekerjasama dalam penerapan skema RSPO untuk mendukung pembangunan kelapa sawit di Indonesia dengan cara:

1. mengadopsi pola-pola pembangunan berkelanjutan yang mensinergikan aspek pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan.
2. menjalin hubungan kemitraan dengan berpegang pada prinsip kepercayaan, menghargai, bertanggung jawab, saling memperkuat, saling ketergantungan, dan saling menguntungkan.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk memberikan fokus pada skripsi ini, penulis membatasi penulisan dari awal munculnya standar global RSPO pada tahun 2004 hingga pada munculnya standart nasional ISPO pada 2011

H. Metode Penelitian

Data yang dalam penelitian ini akan diperoleh dengan studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara pencarian data yang bersumber dari buku, surat kabar, jurnal, sumber internet dan segala dokumen tertulis yang mempunyai akurasi data yang tepat dijadikan sebagai referensi studi kepustakaan.

I. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan. Bab ini merupakan pembuka yang berisikan alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Hal tersebut karena yang tertulis dalam bab ini merupakan dasar atau kerangka pemikiran untuk melakukan langkah selanjutnya dalam penulisan skripsi ini.

BAB II Dimensi Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Serta Politik Industri Kelapa Sawit Indonesia. Bab ini akan dibahas tentang perkembangan kelapa sawit di Indonesia, peranan kelapa sawit dalam perekonomian Indonesia, dan dampak-dampak yang timbul dari industri kelapa sawit tersebut.

BAB III WWF Sabagai Inisiator Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO). Bab ini akan dibahas mengenai sejarah terbentuknya WWF dan

strateginya untuk mendukung RSPO. Selain itu dalam bab ini juga akan dibahas mengenai RSPO sebagai solusi dari masalah-masalah yang timbul dari perkebunan kelapa sawit.

BAB IV Indonesia National Interpretation Working Group (INA-NIWG). Bab ini akan menjelaskan tentang terbentuknya INA-NIWG, program kerja INA-NIWG, serta kerjasama perusahaan kelapa sawit dan WWF Indonesia yang tergabung dalam INA-NIWG untuk penerapan skema RSPO.

BAB V Kesimpulan. Pada bab terakhir ini berisikan tentang kesimpulan dari bab keseluruhan.